

LEMBAR REKOMENDASI PRODUK HUKUM

Setelah melakukan kajian atas

Rancangan : Keputusan Bupati Belu

Nomor : 132 / HK / 2026

Tentang : Perubahan Atas Keputusan Bupati Belu Nomor 155 / HK / 2023
Tentang pembentukan TIM VAUDASI PIUTANE PAJAK DAERAH
Kabupaten Belu

Maka dengan ini kami menyampaikan bahwa produk Hukum sebagaimana dimaksud di atas telah
dikaji oleh Bagian Hukum Setda Belu sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Atambua, 41. MEI 2026

Kepala Bagian Hukum
Setda Belu

Maria Rini Ganggas, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19681114 199903 2 004



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BELU
NOMOR 132/HK/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELU NOMOR 155/HK/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM VALIDASI PIUTANG PAJAK DAERAH
KABUPATEN BELU

BUPATI BELU,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Keputusan Bupati Belu Nomor 43/800.1.3.3/BKPSDMD/KEP/III/2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dari dan dalam Jabatan Pengawas dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Belu serta dengan adanya penambahan keanggotaan pada Tim Validasi Piutang Pajak Daerah Kabupaten Belu, maka perlu dilakukan Perubahan terhadap Keputusan Bupati Belu Nomor 155/HK/2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Belu Nomor 155/HK/2023 tentang Pembentukan Tim Validasi Piutang Pajak Daerah Kabupaten Belu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

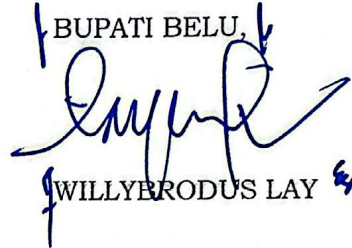
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 881);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 73);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 01 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2025 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 163);
10. Peraturan Bupati Belu Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belu Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belu Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 51);
11. Peraturan Bupati Belu Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 52);
12. Keputusan Bupati Belu Nomor 155/HK/2023 tentang Pembentukan Tim Validasi Piutang Pajak Daerah Kabupaten Belu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Keputusan Bupati Belu Nomor 155/HK/2023 tentang Pembentukan Tim Validasi Piutang Pajak Daerah Kabupaten Belu pada Lampiran angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, angka 28, angka 29, angka 30 dan angka 31, angka 32, angka 33, angka 34, angka 35, angka 36, angka 37 dihapus sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 04 Mei 2026

BUPATI BELU,

WILLYBRODUS LAY

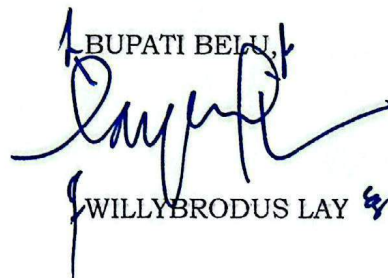
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BELU
 NOMOR : 132/HK/2026
 TANGGAL : 04 MEI 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VALIDASI PIUTANG PAJAK DAERAH
 KABUPATEN BELU

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Belu	Pengarah	
2	Wakil Bupati Belu	Pengawas	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Belu	Pembina	
4	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu	Koordinator	
5	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu	Ketua Tim	
6	Inspektur Inspektorat Kabupaten Belu	Wakil Ketua Tim	
7	Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu	Sekretaris I	
8	Sekretaris pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu	Sekretaris II	
9	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
10	Kepala Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
11	Kepala Bidang Sistem dan Prosedur Prosedur Penagihan dan Keberatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
12	Kepala Bidang Pembukuan Dan Pelaporan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
13	Kepala Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
14	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
15	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
16	Kepala Bidang Pembendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
17	Kepala Sub Bidang Pendataan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu	Anggota	

18	Kepala Sub Bidang Keberatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
19	Kepala Sub Bidang Penagihan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
20	Kepala Sub Bidang Pelaporan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
21	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu		
22	Kepala Sub Bidang Pengembangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
23	Kepala Sub Bidang Evaluasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
24	Kepala Sub Bidang Pembukuan pada Badan Pendapatan Daerah	Anggota	
25	Adriana Bulu, A.M.d/Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Belu	Anggota	
26	Evimia Marek, S.Sos/ Penilai Pajak Ahli Muda pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
27	Prima O.T. Silla, SE/Perencana Ahli Muda pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
28	Mariani P. Y. Berek/Analisis Hukum Sub Bagian Perundang-Undang pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
29	Julita Maria Susanti Klau, SE. /Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belu	Anggota	

KABUPATEN BELU



WILLYBRODUS LAY